



Penerima Bansos Berkurang 2.400 KPM

Akibat Ketidaccocokan Data dan Penerima Dobel

JOGJA, Radar Jogja - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) program sembako di Kota Jogja tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya. Bahkan, jumlahnya cukup drastis hingga 2.400 penerima.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogja, Tri Maryatun mengatakan, penyebab yang terkoreksi antara lain ada yang kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak terdistribusi. Selain itu, ada pula ketidaccocokan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dobel penerima dalam satu keluarga, maupun nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid.

"Cukup banyak yang seperti itu, terpaksa dicoret dari daftar penerima sehingga jumlah penerima pada tahun ini berkurang," katanya belum lama ini.

Tri menjelaskan pengurangannya cukup banyak yakni hampir 2.400 penerima. Jumlah penerima bansos sembako dari pemerintah pusat pada tahun 2020 yakni 20.804 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 18.421 KPM pada tahun 2021. Jumlah ini terdiri atas 10.772 keluarga penerima bantuan sembako reguler dan 7.699 keluarga terdampak pandemi Covid-19.

"Program sembako ini juga sudah masuk ke tiap KPM dan sudah bisa dibelanjakan ke e-waroeng tiap wilayah untuk kebutuhan pokok," ujarnya.

Setiap penerima akan memperoleh ban-

Instansi

Surat

Tindak Lanjut



RADAR JOGJA FILE

CEK DATA: Petugas tengah melakukan verifikasi identitas warga penerima bansos. Untuk tahun ini, penerima bansos mengalami pengurangan yang cukup drastis akibat ketidakcocokan data dan penerima dobel.

tuan non tunai senilai Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan. "Biasanya, para penerima bantuan sembako ini selalu memantau apakah bantuan sudah masuk ke rekening atau belum," sambungnya.

Pun bantuan dana untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) juga sudah mulai dikirim ke rekening penerima. Ada sejumlah 10.921 keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH di Kota Jogja. "PKH relatif tidak ada yang berubah

karena PKH ini kan selalu dimonitor atau *update* datanya oleh teman-teman pendamping PKH," jelasnya.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) pihaknya belum memperoleh informasi mengenai data penerimanya di Kota Jogja. Sebab bantuan langsung diserahkan oleh Kementerian Sosial. Namun, pihaknya juga tetap menyiapkan anggaran di APBD Kota Jogja untuk kebutuhan bantuan sosial. "Sifatnya berjaga-

jaga jika masih ada penduduk miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut," terangnya.

Dikatakan pihaknya tetap menganggarkan istilahnya untuk jaga-jaga apabila yang KSJPS tidak menerima program bansos dari pusat. "Disandingkan dulu datanya untuk mengetahui apakah masih ada warga yang belum menerima bantuan sosial di masa pandemi ini atau tidak," imbuhnya. (wia/bah/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005